

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah paling mendasar bagi suatu bangsa yaitu mencari cara untuk merealisasikan dan mewujudkan kondisi masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan. Problem ini tentu dititipkan kepada pemerintahan di suatu negara untuk bertugas melaksanakan pembangunan kepada seluruh warganya agar mencapai kondisi yang ideal. Secara istilah, pembangunan di Indonesia identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization and europanization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *term political change* (Hasan & Aziz, 2018).

Development atau pembangunan memiliki makna proses untuk meningkatkan keadaan masyarakat di suatu daerah ataupun suatu negara dengan rancangan pembangunan secara khusus. *Modernization* bermakna mewujudkan formula baru untuk menuju kearah yang lebih meningkat, yang sebelumnya primitive dan tradisional. *Westernization and europanization*, maksudnya adalah jika ingin menggapai kemakmuran dan kemajuan, maka harus meniru negara-negara Eropa dan Barat.

Empowering memiliki makna usaha untuk memberdayakan suatu objek atau menambah kemampuan agar lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya. *Industrialization* atau industrialisasi bermakna peralihan arah mata pencaharian yang sebelumnya bertani atau berkebun menjadi pekerjaan industry. *Economic growth* atau pertumbuhan ekonomi, artinya meningkatnya perekonomian dari manusia yang menjadi aktor dalam pembangunan.

Ada berbagai jenis pembangunan, salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pendekatan yang memiliki berbagai dimensi yang menyertakan transformasi besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, seperti halnya mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentas ketimpangan, dan memberantas kemiskinan secara keseluruhan (Novriansyah, 2018). Dalam hal ini, pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting, yaitu suatu proses yang artinya terjadi pembaruan yang terjadi secara terus menerus; upaya peningkatan pendapatan perkapita; dan pertumbuhan pendapatan perkapita mesti berlanjut dalam jangka panjang (Hasan & Aziz, 2018). Permasalahan pembangunan ekonomi yang kompleks dan berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan merupakan faktor penyebab terpenting keadaan pembangunan tersebut, alhasil menyebabkan masalah yang akan dianalisis dalam pembangunan ekonomi mencakup berbagai bidang.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dikatakan terjadi apabila ada kecenderungan kenaikan *output* per kapita yang bersumber dari proses internal perekonomian tersebut. Jadi, kecenderungan tersebut, menurut persyaratan ini, haruslah berasal dari kekuatan yang berasal dari dalam perekonomian sendiri, bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Misalnya bantuan/suntikan dana dari pemerintah pusat dan akan terhenti apabila bantuan tersebut dihentikan. Istilahnya, proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self-generating*, yang berarti proses pertumbuhan itu menghasilkan kekuatan dan untuk keberlanjutan pada periode-periode selanjutnya (Chalid, 2017). Penambahan pendapatan juga diperlukan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena penduduk yang semakin bertambah setiap tahun sehingga kebutuhan juga akan ikut bertambah setiap tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembagian pendapatan (*ceteris paribus*), yang nantinya dapat menyebabkan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi tetapi disertai dengan pembengkakan kemiskinan (Efendi, 2020). Jadi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan saling mempengaruhi, jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan dapat berkurang, dan sebaliknya jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan akan bertambah.

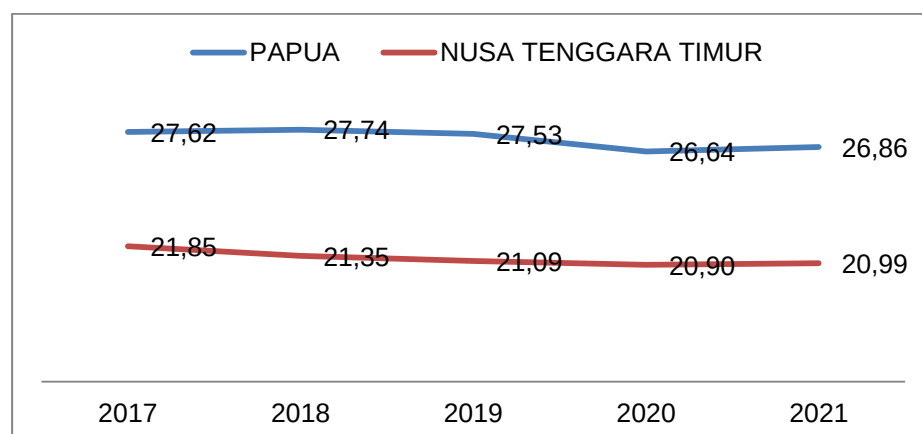
Kemiskinan merupakan permasalahan yang saling berkaitan. Permasalahan utama ini hampir dialami oleh berbagai negara di dunia. Hal ini selalu dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai kondisi kehidupan. Ahli ekonomi bernama Ragnar Nurske (1953) berpendapat mengenai lingkaran kemiskinan atau *The Vicious Circle*, merupakan seperangkat kekuatan yang saling berpengaruh antara yang satu dengan yang lain sehingga menciptakan kejadian dimana suatu negara tetap miskin dan semakin sukar untuk menjangkau tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Menurut Murjanto Danusaputro (2015) kemiskinan merupakan penghasilan sebesar 320 kg yang setara untuk masyarakat di kota atau 240 kg untuk masyarakat di pedesaan dalam setahun. Dalil Hasan menjelaskan ciri-ciri masyarakat miskin, yaitu: (1) di daerah pedesaan biasanya mencakup pengrajin kecil, petani kecil, pengangkut kecil, nelayan kecil, dsb; (2) di daerah perkotaan biasanya mencakup pekerja harian, pedagang kaki lima, pengusaha kecil, dsb; (3) umumnya tidak memiliki penghasilan tetap dan harus bekerja dengan penghasilan tidak tetap tetapi selalu di bawah tingkat penghasilan minimum; (4) sebagian besar tidak bekerja penuh waktu, kurangnya jaminan, pendapatan di

bawah upah minimum kabupaten/kota, tidak ada hari libur, kurangnya pendidikan dan semangat kerja yang rendah.

Isdijoso et al., (2016) melalui SMERU Research Institute mendefinisikan kemiskinan adalah keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik, seperti pendapatan yang terbatas, keterampilan, status kesehatan, penguasaan aset ekonomi, atau akses informasi. Semakin banyak warga miskin di suatu daerah maka semakin tidak sejahtera daerah tersebut, sebaliknya jika semakin sedikit jumlah dan proporsi penduduk miskinnya maka hal tersebut menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin meningkat (Leasiwal, 2013).

Kemiskinan merupakan hal rumit di Negara Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dibandingkan dengan kemiskinan secara nasional, kemiskinan di Provinsi NTT sangat tinggi sebesar 20,99%, sedangkan kemiskinan secara nasional yaitu sebesar 9,71% pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk kategori wilayah dengan jumlah persentase penduduk miskin terburuk ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat.

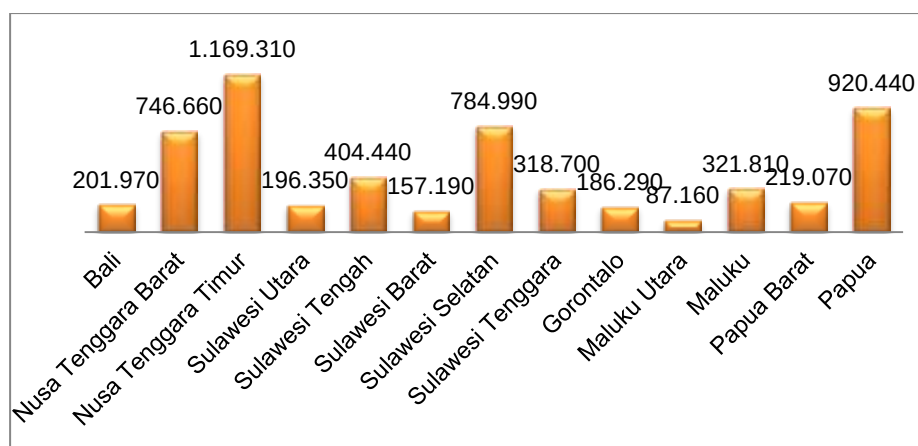


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 (Persen)

Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tinggi, tetapi mereka mendapatkan dana otonomi khusus sehingga Provinsi Papua telah memiliki upaya atau program tertentu dari pemerintah untuk membantu mengurangi kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan rata-rata per tahun kemiskinan yang cukup baik, yaitu sebesar 0,22% per tahun. Selain itu, Provinsi Papua juga merupakan provinsi dengan tren penurunan tingkat kemiskinan yang terbaik secara nasional (Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI, 2020) dan memiliki persentase menahan laju kemiskinan terendah ketiga di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,16% (Humas Dinas Sosial Provinsi NTB, 2021).

Sementara itu, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, meskipun terjadi penurunan tetapi rata-rata per tahun tren penurunan tingkat kemiskinan tersebut lebih kecil, yaitu sebesar 0,19% per tahun. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT juga mengalami penurunan, yang pada harusnya mengalami peningkatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Kawasan Indonesia Timur Tahun 2021 (Ribuan Jiwa)

Dari Gambar 1.2, dapat dilihat provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang berada di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Provinsi Nusa Tenggara Timur

memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi pada tahun 2021 dibandingkan dengan provinsi lain yang masuk dalam KIT. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT sebanyak 1.169,31 juta jiwa kemudian disusul oleh provinsi dengan capaian jumlah penduduk pada posisi kedua ialah Provinsi Papua sebanyak 920,44 ribu jiwa dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT belum dilakukan secara optimal mengingat banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki.

Tabel 1.1 Penduduk Miskin Menurut Wilayah Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2021

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin
Nusa Tenggara Timur	20,99	1.169.310
Nusa Tenggara Barat	13,83	746.660
Bali	4,72	201.970

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur jauh lebih tinggi daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 746,66 ribu jiwa dan Provinsi Bali sebesar 201,97 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kemudian capaian tingkat kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024, bahwasannya kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mencapai target pembangunan yang ditetapkan oleh RPJMN dalam sisi tingkat kemiskinan. Berikut merupakan target dan realisasi

indikator kinerja pembangunan pada sisi tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021.

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 (Persen)

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2017	15,7	21,85
2.	2018	14,3	21,35
3.	2019	12,9	21,09
4.	2020	18,00	20,9
5.	2021	15,69	20,99

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2019

Berdasarkan data tersebut, indikator kinerja Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Indikator tingkat kemiskinan terus mengalami pertambahan melampaui batas target yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMN. Artinya kondisi penduduk miskin makin bertambah dan sulit dikendalikan apabila melihat realisasi tingkat kemiskinan yang mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan terendah terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 20,99% dan yang tertinggi di tahun 2017 sebesar 21,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat tinggi dan perlu upaya serta kinerja lebih keras dari pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Provinsi Nusa Tenggara Timur kaya akan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pulau yang berada di Provinsi NTT, yaitu kurang lebih sebanyak 600 pulau. Dari segi komposisi bebatuan, 40% dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari batuan kompleks bobonaro, diketahui hingga saat ini terkenal dengan komponen mangannya yang

tinggi. Dari segi kualitas, logam mangan di Nusa Tenggara Timur termasuk yang terbaik dan memiliki kualitas terbaik di dunia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang menjanjikan sehubungan dengan orientasi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada komoditas unggulan perikanan dan kelautan serta menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pariwisata nasional (*ring of beauty*) yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023. Pariwisata merupakan ikon utama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah mendunia dan termasuk dalam destinasi super prioritas oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMN juga termuat bahwa sektor pariwisata menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan usaha lokal sehingga kesejahteraan masyarakat bergerak 1 level lebih tinggi khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata. Menurut *United Nations World Tourism Organization*, sektor pariwisata dapat mengurangi kemiskinan mealui peningkatan pendapatan nasional, penambahan lapangan pekerjaan, peneiman devisa hingga perkembangan wilayah pariwisata.

Aktivitas cakupan pariwisata dalam PDRB terdiri dari sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; transportasi dalam sektor transportasi dan pergudangan; jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya dalam sektor jasa perusahaan; kesenian, hiburan, dan rekreasi dalam sektor jasa lainnya. Namun sektor dengan cakupan pariwisata belum menunjukkan kontribusi yang besar terhadap PDRB seperti sektor pertanian,

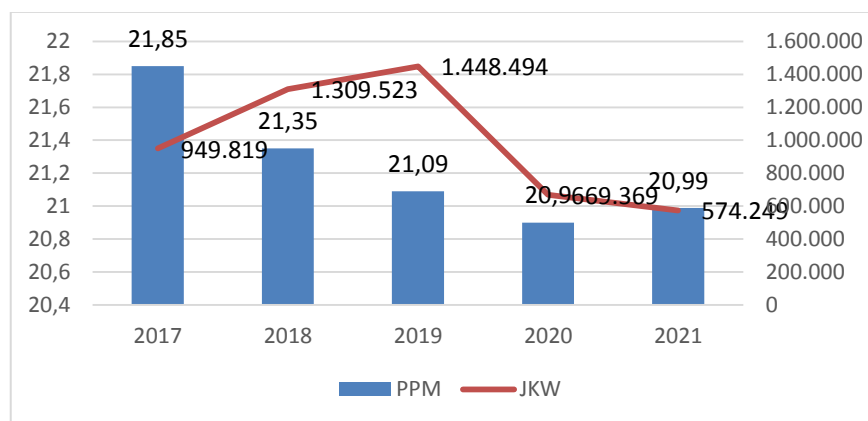
kehutanan, dan perikanan. Meskipun begitu, laju pertumbuhannya terbilang lebih tinggi seperti pada Triwulan II tahun 2021 dengan rata-rata sebesar 14,83%.

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Tahun 2017-2021

Tahun		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Transportasi dan Pergudangan	Jasa Perusahaan	Jasa lainnya	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2017	Triwulan I	11,71	4,96	1,55	4,36	5,17
	Triwulan II	9,73	7,62	1,97	5,63	5,76
	Triiwulan III	13,60	8,77	2,24	9,25	4,73
	Triwulan IV	18,60	9,04	0,06	8,53	4,12
2018	Triwulan I	19,68	8,93	1,63	9,31	2,27
	Triwulan II	17,73	8,08	2,17	6,57	4,01
	Triiwulan III	9,60	7,10	2,36	5,08	1,51
	Triwulan IV	4,13	7,72	0,57	5,18	4,01
2019	Triwulan I	9,89	5,37	4,94	6,93	-1,11
	Triwulan II	8,51	6,95	3,94	7,42	6,59
	Triiwulan III	6,13	1,67	5,24	5,84	1,14
	Triwulan IV	1,73	-0,10	1,42	6,08	7,97
2020	Triwulan I	-10,90	5,56	0,87	4,63	3,11
	Triwulan II	-43,30	-23,36	-52,51	-21,19	-0,33
	Triiwulan III	-33,91	-16,28	-53,35	-21,63	0,55
	Triwulan IV	-19,60	-13,43	-49,90	-22,13	0,93
2021	Triwulan I	-20,72	-14,81	-47,64	-21,59	10,57
	Triwulan II	28,98	16,45	9,42	4,50	3,54
	Triiwulan III	7,08	7,35	7,44	1,76	4,18
	Triwulan IV	12,35	5,09	4,74	1,12	2,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Berdasarkan data pada gambar 1.3, capaian jumlah wisatawan yang berkunjung di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai indikator sektor pariwisata mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2017-2021. Capaian kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara pada sektor pariwisata ikut menurun drastis menjadi 669.369 orang pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Pariwisata seharusnya dapat memberikan *multiplier effect* yang berujung dapat mengurangi angka kemiskinan.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021

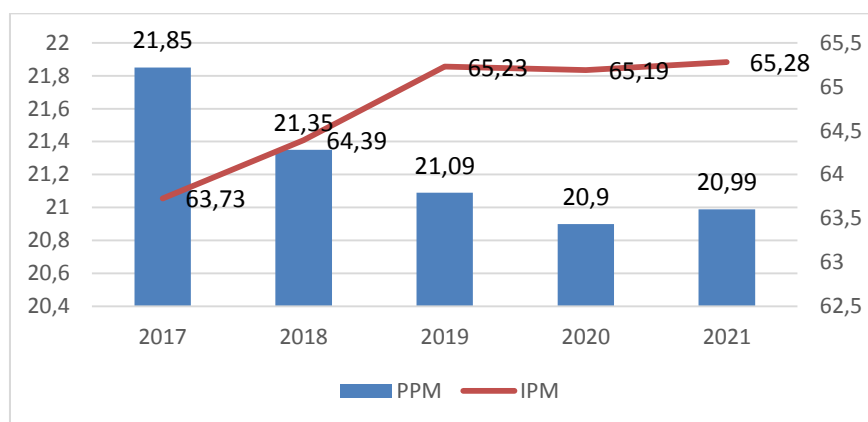
Gambar 1.3 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 (Jiwa)

Jika nantinya semua potensi yang dimiliki dapat dikelola dengan baik, maka seharusnya Provinsi NTT bisa menjadi salah satu provinsi yang tumbuh maju di Negara Indonesia dan tingkat kemiskinan menjadi rendah. Asset sumber daya alam yang dimiliki tidak diiringi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus, sehingga pemanfaatan potensi di NTT belum maksimal.

Kualitas SDM dapat menjadi penyebab dibalik munculnya masyarakat miskin. Kualitas SDM dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang rendah akan menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Jika produktivitas tenaga kerja rendah maka pendapatan yang didapat juga rendah

yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Dalam konteks pembangunan ekonomi suatu wilayah, IPM diidentifikasi sebagai salah satu ukuran kunci yang termasuk dalam rencana dasar pembangunan. IPM dapat mengukur 3 dimensi pembangunan yang cenderung mencerminkan kompetensi dasar, yaitu umur yang panjang dan sehat, wawasan dan keterampilan, serta akses terhadap sumber daya untuk kehidupan yang baik. IPM sebagai acuan pembangunan suatu daerah harus berkorelasi negatif dengan keadaan kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan wilayah tersebut memiliki IPM yang tinggi, idealnya jika kualitas hidup masyarakatnya tinggi atau bisa juga menegaskan bahwa jika nilai IPM tinggi maka peringkat kemiskinan di masyarakat harus rendah (Sayifullah & Gandasari, 2016).

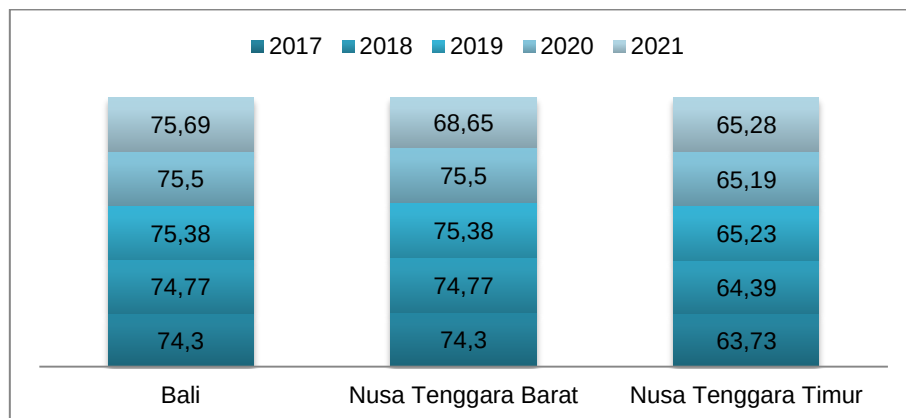


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi NTT tahun 2017 sampai dengan 2019 terlihat meningkat sebesar 1,5%, tetapi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19% dan kembali bertambah 0,09% pada tahun 2021. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 65,28%. Tetapi

dengan adanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan di Provinsi NTT tidak serta merta mengalami penurunan. Provinsi NTT masih termasuk wilayah dengan status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) level menengah bawah, seperti pada tahun 2021 yaitu sebesar 65,28%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

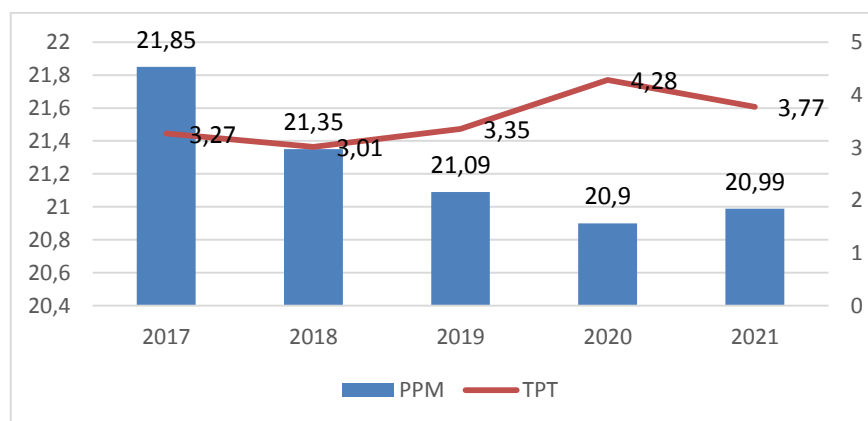
Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Wilayah Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2017-2021

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat rendah daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan indeks pembangunan manusia sebesar 68,65% dan Provinsi Bali sebesar 75,69% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Indikator lain yang turut serta mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk dengan usia angkatan kerja yang menganggur, mampu bekerja, yang memiliki pekerjaan tetapi semasa itu tidak bekerja, dan sedang aktif mencari pekerjaan. Definisi pengangguran ini spesifik dan kaku dan tidak hanya mencakup "semua orang tanpa pekerjaan". Baik yang menganggur maupun yang dipekerjakan merupakan angkatan kerja, atau bagian dari populasi yang dapat dipekerjakan dan tertarik. Tidak terhitung

sebagai bagian dari angkatan kerja adalah warga negara yang tidak mencari pekerjaan. Misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa, dan calon pekerja yang berhenti mencari pekerjaan karena putus asa sebab merasa tidak ada pekerjaan yang tersedia (Master Class, 2022).

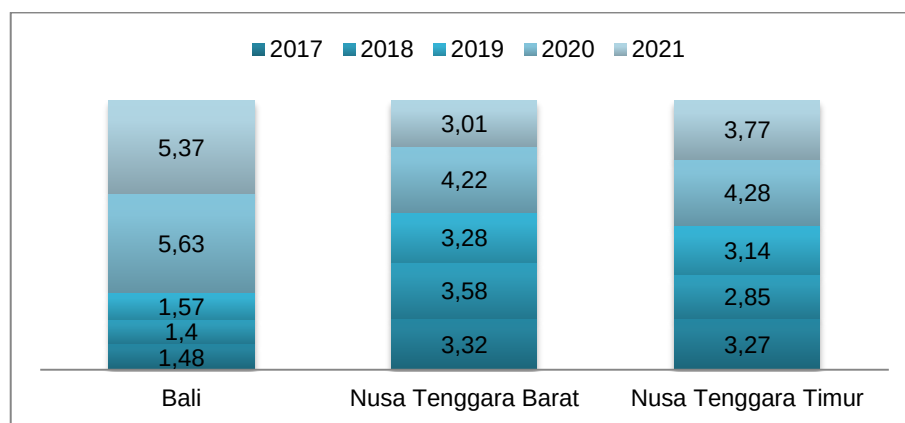
Pengangguran sangat erat kaitannya dengan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah, diwujudkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ditandai dengan penghasilan yang sangat rendah, tempat tinggal yang tidak memadai, kesehatan yang buruk, tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pendidikan yang tinggi, kematian anak yang tinggi, harapan hidup yang rendah, dll. Dalam hal kesempatan mencari kerja yang rendah berarti disebut pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan penurunan pendapatan, sehingga tidak memiliki bekal yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari pada akhirnya akan jatuh ke dalam kemiskinan, sehingga jumlah pengangguran mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 (Persen)

Berdasarkan data yang ada pada BPS tahun 2017 sampai dengan 2021, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung mengalami fluktuatif. TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,28% dibawah TPT nasional yaitu 7,07%. Fenomena TPT yang fluktuatif ini tidak setara dengan persentase kemiskinan yang mengalami penurunan dan seharusnya tingkat pengangguran juga mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2017-2021

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi kedua setelah Provinsi Bali dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37% dan posisi ketiga oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,01% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dari penjelasan diatas, maka penulis ingin meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Pariwisata, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka perumusan masalah yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pariwisata terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pariwisata terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan untuk menambah kerangka pemikiran dan kepenulisan, selain juga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca dalam memahami penyebab kemiskinan.
2. Dapat digunakan untuk bahan informasi dan penelitian selanjutnya bagi kalangan mahasiswa, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan.
3. Dapat memberikan informasi sebelum pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di masa mendatang.